

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan mengenai landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto merupakan total nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah bruto diartikan sebagai kombinasi antara faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi, atau bisa juga dilihat sebagai nilai *output* dikurangi biaya antara (*intermediate cost*). PDRB mencakup komponen-komponen faktor pendapatan seperti upah, gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan serta memperhitungkan penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Dengan demikian, produk domestik regional bruto merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Dalam BPS, metode perhitungan produk domestik regional bruto dapat menggunakan dua harga, yaitu:

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik untuk penilaian

produksi, biaya antara, maupun komponen nilai tambah. PDRB ini dikategorikan berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan digunakan untuk melihat kondisi perekonomian pada tahun tersebut.

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan harga barang ataupun jasa pada tahun tertentu (tahun dasar), baik itu pada saat menilai produksi, biaya, maupun komponen nilai tambah. PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun serta untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi tanpa pengaruh faktor harga.

PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita menggambarkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tertentu yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan memprediksi tingkat pendapatan masyarakat yang dapat dihitung dengan membagi produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Sementara laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menghitung persentase perubahan total *output* ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghasilkan pendapatan bagi penduduknya.

Kemampuan dari suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dapat digambarkan dari nilai PDRB. Maka PDRB yang dihasilkan setiap daerah berbeda karena tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi atau faktor produksi yang dimiliki. Secara umum, PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi tentunya memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Kebijakan pemerintah daerah harus dirancang secara tepat agar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tercapai (Prasetya, 2018).

2.1.1.1 Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung melalui dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode Langsung

Metode langsung merupakan metode perhitungan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Selain itu, pemakaian data daerah juga dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Hasil perhitungan dengan metode ini akan memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Metode langsung dalam perhitungan produk domestik regional bruto ini terdiri dari

beberapa pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah metode perhitungan dengan memperhatikan jumlah hasil produksi dari berbagai sektor. Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari setiap nilai produksi bruto masing-masing sektor dan subsektor. Pendekatan ini juga biasa disebut sebagai pendekatan nilai tambah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah dilakukan dengan cara *output* dikurangi biaya. Nilai tambah bruto di sini mencakup beberapa komponen pendapatan faktor, seperti bunga, upah, keuntungan dan sewa tanah, pajak tidak langsung neto, serta penyusutan. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari setiap sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, maka diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung PDRB dengan menjumlahkan seluruh faktor penerimaan hasil produksi seperti upah, investasi, sewa, dan profit. Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari profit, maka surplus usahanya tidak diperhitungkan dan yang termasuk ke dalam surplus usaha di sini berupa bunga, keuntungan, serta sewa tanah.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah seluruh komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap domestik bruto perubahan inventori, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, serta ekspor neto.

2. Metode Tidak Langsung (Metode Alokasi)

Metode tidak langsung adalah metode penghitungan alokasi dengan cara mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi atau sebaliknya, yaitu PDRB provinsi menjadi PDRB kabupaten atau kota dengan menggunakan beberapa indikator produksi dan indikator lainnya yang sesuai sebagai alokator (Sukirno, 2004). Alokator yang digunakan dapat didasarkan atas:

- a. Nilai produksi bruto,
- b. Jumlah produksi fisik,
- c. Tenaga kerja,
- d. Penduduk, dan
- e. Alokator lainnya yang dianggap cocok untuk daerah tersebut.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan produk domestik bruto atau pendapatan nasional bruto tanpa mempertimbangkan apakah peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, serta adanya perubahan dalam struktur ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi. Tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara dalam

program pembangunan dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam menganalisis pembangunan suatu negara maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang menekankan pada tiga aspek penting, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Arti proses dalam pertumbuhan ekonomi yaitu harus menunjukkan perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Sementara arti dari *output* per kapita, yaitu perlu mempertimbangkan *output* total (*Gross Domestic Product/GDP*) dan jumlah penduduk, maka tidak bisa hanya melihat dari salah satu sisi saja, karena teori pertumbuhan ekonomi yang baik harus mampu untuk menjelaskan keduanya dan hasil akhirnya akan didapat perkembangan *output* per kapita. Selanjutnya arti dari jangka panjang yaitu pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari peningkatan *output* perkapita dalam jangka panjang, bukan hanya satu atau dua tahun saja, karena dapat dikatakan tumbuh apabila suatu perekonomian dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan *output* per kapita (Todaro dan Smith, 2006).

2.1.3 Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah seluruh orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dengan demikian, penduduk merupakan jumlah orang yang menetap di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Menurut Mudrajat Kuncoro (1997) jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan masalah yang mendasar karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat tercapainya realisasi, maka tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengakibatkan sumber daya terkikis, kerusakan lingkungan, rendahnya tingkat tabungan, serta masalah sosial lainnya seperti keterbelakangan, kemiskinan, dan kelaparan.

Di sisi lain, Adioetomo (2010) mengemukakan bahwa jumlah penduduk yang terlampau besar akan menurunkan standar hidup masyarakat. Terutama jika jumlah penduduk berhubungan dengan lahan pertanian dan luas tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menimbulkan masalah serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar perlu diimbangi dengan dukungan ekonomi yang memadai agar tidak menimbulkan masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah bagi pembangunan yang akan dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan tenaga kerja, sementara daerah belum mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas (Arsyad, 2004).

Dalam upaya mengoptimalkan peranan penduduk dalam pembangunan, diperlukan kehadiran penduduk dengan kualitas yang baik untuk mendukung pembangunan yang baik pula. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan

seharusnya terpusat pada masyarakat sebagai sasaran utama pada peningkatan sumber daya manusia. Sehingga penduduk mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan, mandiri, dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan serta permasalahan yang ada (Hutasoit, 2017).

2.1.4 Pembangunan Ekonomi

Di negara maju maupun berkembang, pembangunan ekonomi sangatlah penting guna mendukung keberlangsungan hidup masyarakatnya. Namun, peranan pembangunan ekonomi lebih besar mengarah pada negara-negara yang sedang berkembang dan perekonomiannya belum stabil. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses atau usaha masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dan mengembangkan kegiatan ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat dan diiringi dengan terciptanya masyarakat yang sejahtera (Sukirno, 2006).

Menurut Arsyad (2004) pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai tahapan atau proses yang dijalani oleh setiap negara dan berujung pada peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, mengatasi ketimpangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus mampu menciptakan perubahan yang mendasar dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, sistem kelembagaan, serta melakukan perbaikan dan

modernisasi struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi memiliki makna yang luas dan mencakup perubahan menyeluruh dalam susunan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk memperbaiki perekonomian suatu negara dari kondisi stagnan menjadi meningkat, serta mengubah pendapatan rendah menjadi tinggi (Todaro & Smith, 2011). Menurut Jhingan (2014) terdapat empat faktor yang menjadi modal dalam pembangunan ekonomi, yaitu sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, motivasi dan pendidikan), sumber daya alam (lahan tanah, ketersediaan mineral, bahan bakar, dan iklim), pembentukan modal (infrastruktur seperti jalan raya), dan peningkatan teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen serta kewiraswastaan).

Pemerintah di negara berkembang harus dapat menciptakan suatu kebijakan pembangunan dan solusi relevan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negaranya tanpa mengabaikan permasalahan umum yang terjadi, seperti permasalahan kemiskinan, ketimpangan, dan permasalahan sosial lainnya. Hal ini diupayakan agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan yang terjadi.

2.1.4.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (2004) pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengelola sumber daya yang tersedia serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mendorong inisiatif daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan

lapangan kerja baru dan meningkatkan kegiatan sektor ekonomi yang ada, membangun institusi dan industri alternatif baru, mengidentifikasi pasar, mentransfer teknologi, meningkatkan produksi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.

Dampak dari keadaan sosial ekonomi di setiap daerah yang berbeda-beda adalah perbedaan cakupan campur tangan pemerintah untuk setiap daerah. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah ini mengakibatkan perbedaan terhadap tingkat kesejahteraan daerah. Ekspansi ekonomi di suatu daerah dapat memberikan dampak positif bagi daerah tersebut, tetapi juga dapat merugikan bagi daerah lain, karena tenaga kerja, modal, dan perdagangan yang dilakukan cenderung akan berpindah ke daerah yang melakukan ekspansi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Myrdal (1957) mengenai dampak balik pada suatu daerah (Arsyad, 2010).

Menurut Arsyad (2010) masalah utama dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas dari daerah yang bersangkutan, serta potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang tersedia di daerah.

2.1.5 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

2.1.5.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Klasik dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Menurut pandangan para ekonom Klasik ini ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi

yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal (Suryana, 2000).

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik dipelopori oleh Robert Sollow, dan diikuti oleh ahli ekonomi lain seperti Edmund Phelps, Harry Johnson, dan J.E. Meade. Dasar dari teori ini adalah pandangan dari para ekonom Klasik, maka teori ini disebut dengan teori pertumbuhan Neo-Klasik. Teori ini menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Menurut teori ini, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dari penawaran faktor-faktor produksi dan teknologi yang semakin maju. Asumsi dari teori ini didasarkan pada teori pertumbuhan Klasik di mana memiliki asumsi *full employment*, artinya keadaan ekonomi dari barang modal dan sumber daya tenaga kerja dipergunakan secara keseluruhan dengan efisien dari waktu ke waktu (Sukirno, 2006).

Model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas dari faktor produksi, baik itu modal maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan awalnya berjalan tidak

sesuai, mengakibatkan modal dan tenaga kerja yang ada hanya cenderung terdapat dan terkonsentrasi di wilayah atau daerah lebih maju dalam perekonomiannya, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan regional yang semakin melebar. Apabila pembangunan ini dalam prosesnya berjalan dengan terus menerus dan mengakibatkan semakin meningkatnya fasilitas maupun infrastruktur yang ada, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin meningkat. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat menciptakan suatu wilayah tidak hanya maju dalam segi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi diikuti pula dengan berkurangnya ketimpangan pembangunan antar daerahnya (Sjafrizal, 2008).

2.1.5.2 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik dan Dampak Sebar

Perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar wilayah menurut Myrdal (1957) akan selamanya menimbulkan *backwash effect* yang lebih mendominasi daripada *spread effect* sehingga pertumbuhan ekonomi regional menciptakan proses yang tidak ekuilibrium (*disequilibrium*). Pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses yang membuat si kaya mendapatkan keuntungan yang semakin banyak, akan tetapi mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini maka akan semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 2014).

Dampak balik atau *backwash effect* merupakan semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan oleh

faktor-faktor dari luar wilayah tersebut. Kondisi ini terjadi karena aliran modal, penduduk, dan barang serta jasa dari wilayah maju ke wilayah terbelakang ataupun wilayah terbelakang ke wilayah maju hanya menguntungkan wilayah maju saja, akan tetapi menekan kegiatan ekonomi di wilayah terbelakang. Sebaliknya, dampak sebar atau *spread effect* merupakan proses pembangunan yang menyebar dimana modal, penduduk, dan barang jasa mengalir dari wilayah maju ke wilayah terbelakang sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk keduanya maka hal inilah yang menyebabkan keseimbangan pembangunan wilayah. Dampak balik atau *backwash effect* cenderung memperkuat dan mengarah kepada pertumbuhan suatu wilayah yang sudah memiliki potensi dalam pembangunan, sementara dampak sebar atau *spread effect* menjangkau daerah-daerah sekitar pusat pertumbuhan, di mana arah penyebarannya dari titik pusat pertumbuhan ke daerah-daerah yang berada di sekitarnya, sehingga dampaknya lebih luas. Menurut Myrdal, ketimpangan pembangunan regional disebabkan oleh kuatnya dampak balik (*backwash effect*) dan lemahnya dampak sebar (*spread effect*) di negara-negara terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 2014).

Menurut Myrdal dalam Arsyad (2010) pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju dapat menciptakan hambatan yang lebih besar bagi daerah-daerah terbelakang untuk dapat maju dan berkembang, dan suatu keadaan yang menghambat pembangunan tersebut digolongkan sebagai *backwash effect*. Akan tetapi, perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang terbelakang dan keadaan tersebut disebut *spread effect*.

2.1.5.3 Teori *Trickle Down Effect*

Teori *trickle down effect* merupakan salah satu topik penting dalam pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini pertama kali digagas oleh Albert Otto Hirschman pada tahun 1954. Teori *trickle down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan berpotensi menghasilkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori ini mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, manfaat dari pertumbuhan ekonomi awalnya akan dirasakan oleh kelompok kaya dan kemudian kelompok miskin akan mendapatkan manfaat ketika kelompok kaya membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang diterimanya (Larasati, 2017).

Dalam teori *trickle down effect*, proses pemerataan ekonomi dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor utama yang kemudian sektor tersebut akan menyebarkan hasil pertumbuhannya ke sektor lain, dengan harapan dapat membawa pada perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pertumbuhan ekonomi terletak pada titik asalnya sebelum hasilnya disebarkan ke berbagai daerah, diutamakan pada titik originalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat. Hirschman menggunakan istilah titik pertumbuhan (*growing point*) atau pusat pertumbuhan (*growing centre*) untuk menggambarkan beberapa titik pertumbuhan di suatu negara, yang di mana industri

berkelompok pada titik pertumbuhan tersebut dan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh industri yang bersangkutan. Oleh karena itu, Hirschman mendorong agar dapat membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan agar dapat menciptakan dampak penyebaran pembangunan yang lebih efektif (Larasati, 2017).

Dalam pusat pertumbuhan terdapat lebih banyak peluang investasi, lapangan kerja, dan upah buruh yang cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu fokus utama dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi menurut teori *trickle down effect* dan diharapkan investasi mampu menciptakan kesempatan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan pada gilirannya dapat pemeratakan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan yang terjadi (Larasati, 2017).

2.1.5.4 Teori Hipotesis Kuznets

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Meningkatnya kapasitas tersebut ditentukan karena adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologis yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada (Todaro dan Smith, 2006).

Kuznets (1957) dalam Tambunan (2006) mengemukakan mengenai hipotesis U terbalik yang dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola atau hal ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada

sektor modern perekonomian yang memiliki penyerapan tenaga yang rendah. Adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan diperkuat dengan adanya hipotesis Kuznets yang diperkenalkan oleh Simon Kuznets yang merupakan seorang ekonom Neo-Klasik (Todaro dan Smith, 2011).

Menurut Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung menurun atau memburuk, tetapi akan meningkat dan membaik pada tahap selanjutnya. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan tidak hanya dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dilihat juga dari karakter pertumbuhan yang ada di daerah tersebut. Karakter ini mencakup aspek apa saja yang dicapai, siapa saja yang ikut berkontribusi untuk menciptakan pertumbuhan, sektor mana yang ingin dikembangkan dan lainnya. Karakteristik ini yang akan menentukan apakah pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan standar hidup masyarakat miskin yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat ketimpangan di daerah tersebut (Todaro & Smith, 2011).

2.1.6 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan merupakan kesenjangan atau perbedaan kemakmuran ekonomi antar wilayah atau daerah, hal ini dapat tercermin dari adanya perbedaan standar hidup relatif masyarakat, tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan, pendapatan perkapita, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Ketimpangan dalam pembangunan wilayah sering muncul dalam aktivitas ekonomi di suatu daerah. Ketimpangan yang terjadi umumnya disebabkan karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang berbeda di setiap wilayah (Sjafrizal, 2008). Menurut Todaro (2000) dalam Ragil

(2018) tujuan pembangunan ekonomi daerah atau regional bersifat multidimensional, meliputi penciptaan pertumbuhan serta perubahan dalam struktur ekonomi, perbaikan kondisi sosial, serta upaya untuk mengurangi atau mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

Isu ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali digagas oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut, terdapat sebuah prediksi mengenai hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008). Menurut hipotesis Neo-Klasik, pada tahap awal proses pembangunan suatu negara, tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung meningkat hingga mencapai titik puncaknya. Namun, jika proses pembangunan terus berlanjut, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu (Sjafrizal, 2008).

2.1.6.1 Penyebab Ketimpangan

Menurut Sjafrizal (2017) faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam tentu akan mempengaruhi kegiatan produksi di suatu daerah. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif murah, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih sedikit hanya

akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih mahal sehingga daya saingnya menjadi lemah dan menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Dalam hal ini, kondisi yang dimaksud mencakup perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, serta tingkah laku dan etos kerja masyarakat di setiap daerah. Faktor-faktor atau kondisi tersebut akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja masyarakat.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa mencakup kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang didukung oleh pemerintah maupun tidak. Apabila mobilitas kurang lancar, maka kelebihan produksi di suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Di sisi lain, migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya, daerah terbelakang akan sulit mendorong kegiatan ekonominya dan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi ketika tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi

cenderung bergerak lebih cepat di daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang terbilang besar. Kondisi tersebut kemudian akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah, maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah ditentukan oleh sistem yang dianut. Apabila sistem pemerintahan bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan ke pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Namun, apabila sistem pemerintah otonomi atau desentralisasi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan akan cenderung rendah. Berbeda dengan investasi swasta yang biasanya ditentukan oleh kekuatan pasar, yang dapat dilihat dari ongkos transportasi baik untuk bahan baku maupun hasil produksi, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, dan tingkat persaingan usaha. Maka tidaklah heran jika investasi swasta cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

2.1.6.2 Dampak Ketimpangan

Terjadinya ketimpangan pembangunan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya, dapat mendorong daerah lain yang kurang maju untuk dapat

bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan akan tercapai. Negatifnya, dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, serta tingginya ketimpangan yang dirasakan sebagai ketidakadilan (Todaro & Smith, 2006).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak serta merta diikuti dengan pemerataan dapat menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat menimbulkan permasalahan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam dan melebar.

Jika pertumbuhan ekonomi dimulai dan ketimpangan pendapatan menurun secara bersamaan, pembangunan ekonomi suatu daerah berhasil. Namun, ketika sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dan hanya sebagian kecil yang berpenghasilan tinggi, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan adalah dua aspek penting dari pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya kutub strategi pembangunan yaitu pertumbuhan dan pemerataan sering kali saling mengabaikan (*trade off*). Artinya pembangunan yang mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi cenderung mengorbankan aspek pemerataan, begitu juga sebaliknya (Arsyad, 2017).

2.1.6.3 Indeks Williamson

Indeks Williamson diperkenalkan oleh Jeffrey G. Williamson dalam studinya pada tahun 1966 dan merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dalam

konteks statistik, indeks williamson merupakan koefisien variasi umum yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional. Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, jika hasil semakin mendekati nol maka ketimpangan pembangunan semakin rendah atau merata, begitupun sebaliknya.

2.1.6.4 Tipologi Klassen

Analisis tipologi klassen merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Indikator utama yang digunakan yaitu rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (sumbu vertikal) dan rata-rata pendapatan per kapita (sumbu horizontal). Berdasarkan analisis tipologi klassen, suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi empat kuadran (Sjafrizal, 2008):

1. Kuadran I, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*). Daerah ini merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya. Diperkirakan daerah ini akan terus berkembang di masa mendatang.
2. Kuadran II, daerah berkembang cepat (*high growth but low income*). Daerah ini memiliki potensi pengembangan yang besar akan tetapi belum dikelola dengan optimal. Meskipun laju pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapita yang mencerminkan tahap pembangunan telah dicapai masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Diperkirakan daerah ini akan mampu berkembang pesat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang lebih maju.

3. Kuadran III, daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Daerah ini merupakan daerah yang relatif tergolong maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan ekonomi utama di daerah tersebut. Meskipun potensi pembangunan yang dimiliki cukup besar, akan tetapi di masa mendatang diperkirakan laju pertumbuhannya tidak akan begitu cepat.
4. Kuadran IV, daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah ini memiliki tingkat kemakmuran masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah. Akan tetapi melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian serta peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini akan mampu secara bertahap mengejar ketertinggalannya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan dapat memperkaya pemahaman penulis. Berikut disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan	Analisis indeks williamson	Objek penelitian, analisis tipologi	Ketimpangan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.24 No.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2017-2023 (Riung et al., 2024)		kelas, analisis korelasi pearson	Gorontalo berada dalam kategori sedang.	
2.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2019 (Ridho et al., 2022)	Analisis indeks williamson	Objek penelitian, analisis tipologi kelas, analisis korelasi pearson	Hasil analisis indeks williamson berfluktuatif dan cenderung menurun, menunjukkan ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera rendah karena rata-rata nilai indeks williamson sebesar 0,219.	Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.11 No.1
3.	Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Jabodetabek Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2013-2020 (Hidayadi et al., 2022)	Analisis indeks williamson, analisis tipologi kelas	Objek penelitian, analisis korelasi pearson	Saat pandemi tahun 2020 di Jabodetabek IW sebesar 0,66 masuk dalam kategori ketimpangan pembangunan tinggi. Hasil tipologi kelas Kuadran I Kota Tangerang. Kuadran II tidak ada. Kuadran III Kota Tangsel, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Jaktim, Depok, Kota Bogor, dan Kab. Bogor. Kuadran IV Jakut, Kep. Seribu, Jakbar, Jaksel dan Jakpus.	<i>Iltizam Journal Shariah Economic Research</i> Vol.6. No.1
4.	Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah	Analisis indeks williamson, analisis tipologi	Objek penelitian	Hasil analisis indeks williamson menunjukkan ketimpangan rendah. Daerah	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.21 No.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 (Ambar et al., 2021)	klassen, analisis korelasi pearson		cepat maju cepat tumbuh (2 kab/kota); daerah maju tapi tertekan (1 kab/kota); daerah cepat berkembang (2 kab/kota); daerah relatif tertinggal (4 kab/kota). Hasil korelasi pearson pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan signifikan dengan indeks ketimpangan di Provinsi Maluku Utara.	
5.	Studi Komparatif Ketimpangan Antar Pulau di Indonesia Tahun 2016-2020 (Panggarti et al., 2022)	Analisis indeks williamson, analisis korelasi pearson	Objek penelitian, analisis tipologi klassen	Hasil analisis indeks williamson menunjukkan Pulau Sumatera, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua masuk dalam kategori ketimpangan tinggi. Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan kategori ketimpangan sangat tinggi. Pulau Sulawesi mendekati merata. Pulau Maluku kategori sangat merata. Ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia memiliki hubungan signifikan sangat kuat dengan investasi.	Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol.24 No.2
6.	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa	Analisis indeks williamson	Analisis tipologi klassen, analisis korelasi pearson	Hasil analisis indeks williamson menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol.2 No.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tahun 2011-2016 (Endarwati et al., 2017)			Jawa termasuk kategori ketimpangan tinggi, yaitu nilai IW lebih dari 1 dan cenderung mengalami penurunan.	
7.	Analisis Ketimpangan Antar Wilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Pulau Kalimantan Tahun 2012-2019 (Pratiwi, 2021)	Analisis indeks williamson, analisis korelasi pearson	Objek penelitian, analisis korelasi pearson, analisis entrophy theil, analisis shift share	Ketimpangan antar wilayah di Pulau Kalimantan tergolong tinggi dengan tren yang cenderung menurun. Terdapat hubungan yang positif signifikan kurang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks ketimpangan. Struktur ekonomi di Pulau Kalimantan mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri.	Jurnal Borneo Administrator Vol.17 No.1
8.	Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Ismail, 2020)	Analisis tipologi klassen, analisis indeks williamson, analisis korelasi pearson	Objek penelitian	Hasil tipologi klassen daerah cepat maju cepat tumbuh (3 kab/kota); daerah maju tapi tertekan (2 kab/kota); daerah berkembang cepat (5 kab/kota); daerah relatif tertinggal (4 kab/kota). Ketimpangan pembangunan kategori rendah. Hasil korelasi pearson menunjukkan hubungan positif signifikan kuat	Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan ISBN: 978-602-53460-5-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				antara indeks ketimpangan dan PDRB di Provinsi Kalbar.	
9.	Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Noviar, 2021)	Analisis indeks williamson, analisis tipologi klassen	Analisis korelasi pearson	Hasil indeks williamson menunjukkan angka 0,7 artinya ketimpangan pembangunan antar kab/kota di Provinsi Banten cukup tinggi. Hasil tipologi klassen menunjukkan klasifikasi daerah cepat berkembang 5 kab/kota, daerah cepat maju cepat tumbuh 1 kab/kota, daerah maju tapi tertekan 1 kab/kota, daerah relatif tertinggal 1 kab/kota.	Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.5 No.1
10.	Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017 (Fahrizal et al., 2019)	Analisis indeks williamson, analisis tipologi klassen	Analisis korelasi pearson, analisis LQ	Berdasarkan hasil indeks williamson ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tinggi. Hasil tipologi klassen sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian termasuk sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah serta merupakan sektor maju tapi tertekan. Hasil LQ menunjukkan ada 5	<i>Dinamic: Directory Journal of Economic</i> Vol.1 No.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				sektor basis dan 4 sektor non basis.	
11.	Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kab/Kota Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016 (Ragil, 2018)	Analisis indeks williamson	Analisis tipologi klassen, analisis korelasi pearson	Hasil indeks williamson menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi yaitu sebesar 0,824.	Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi ISSN: 1907-5995
12.	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kebijakan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur (Berlianantiya, 2017)	Analisis indeks williamson, analisis korelasi pearson	Analisis tipologi klassen	Hasil indeks williamson di Jawa Timur tahun 2004-2013 sebesar 1,05 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Jawa Timur negatif tidak signifikan.	<i>Equilibrium</i> Vol.5 No.2
13.	Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah Antar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Syarifudin et al., 2022)	Analisis indeks williamson, analisis tipologi klassen	Analisis korelasi pearson	Hasil indeks williamson sebesar 0,65 mengindikasikan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi. Hasil tipologi klassen menunjukkan sebagian besar kab/kota di Jawa Barat masuk dalam daerah berkembang.	<i>Journal of Business and Economics Research</i> Vol.3 No.2
14.	Analisis Ketimpangan Pembangunan di	Analisis tipologi klassen	Analisis korelasi pearson,	Hasil indeks theil menunjukkan ketimpangan di	<i>E-Journal Al-Dzahab</i> Vol.3 No.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indonesia Tahun 2010-2020 (Zasriati, 2022)		indeks williamson, analisis indeks theil	Indonesia sebesar 0,03 menunjukkan ketimpangan yang rendah. Hasil analisis tipologi klassen, kuadran I (2 provinsi), kuadran II (5 provinsi), Kuadran III (17 provinsi), Kuadran IV (9 provinsi).	
15.	Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Sektor Unggulan DKI Jakarta untuk <i>Rebound</i> Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Subarja, 2024)	Analisis indeks williamson, analisis tipologi klassen	Analisis korelasi pearson, analisis entrophy theil, analisis shift share, analisis LQ dan DLQ	Hasil menunjukkan taraf kesenjangan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta relatif rendah. Provinsi DKI Jakarta memiliki sektor unggulan sekaligus menjadi sektor potensial di masa mendatang pada masing-masing kota kecuali Kab. Kepulauan Seribu.	Jurnal Riset Ekonomi Vol.3 No.5

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan seluruh perubahan besar baik terhadap struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, maupun mengurangi ketimpangan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi yang didukung oleh potensi wilayah tersebut. Salah satu indikator dalam pembangunan

ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Tentunya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut, apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini yaitu ketidakmerataan atau ketimpangan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan potensi antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dari masing-masing penduduk di daerahnya.

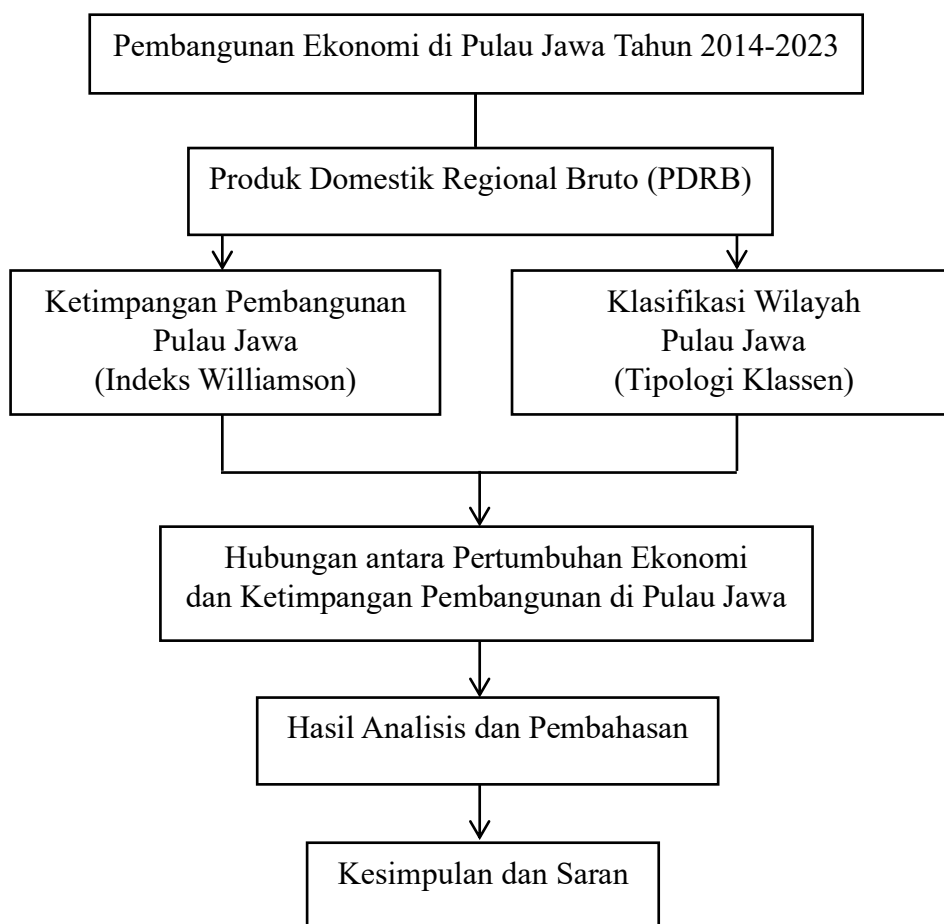
Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan adalah dua aspek penting dari pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya kutub strategi pembangunan yaitu pertumbuhan dan pemerataan sering kali saling mengabaikan (*trade off*). Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi pembangunan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga pada gilirannya akan mengurangi ketimpangan yang terjadi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun penelitian sebelumnya yang dapat membuktikan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Kalimantan tahun 2012-2019 tergolong tinggi dan adanya hubungan positif signifikan kurang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Pulau Kalimantan. Selain itu, penelitian yang

dilakukan oleh Ambar (2021) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Maluku tahun 2015-2019 tergolong rendah dan hasil analisis korelasi negatif tidak signifikan yang berarti tidak dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Maluku.

Maka dalam penelitian ini, untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa yaitu dengan menggunakan alat analisis indeks williamson. Adapun untuk mengklasifikasikan dan mengetahui pola serta struktur pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menggunakan alat analisis tipologi klassen yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas daerah dalam mengurangi dan menanggulangi tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Selanjutnya penulis menggunakan korelasi pearson untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa.

Secara sistematis untuk mempermudah penelitian ini, penulis perlu membuat kerangka berpikir agar dapat menjelaskan analisis ketimpangan pembangunan dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dengan menggunakan analisis indeks williamson, tipologi klassen, dan korelasi pearson. Hasil analisis dan pembahasan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang kemudian dalam tahap akhir akan ditarik kesimpulan. Dalam kesimpulan dan saran dapat diketahui bagaimana hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran apa saja yang dapat diberikan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Adapun berikut merupakan skema kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap suatu permasalahan dan untuk mengetahui kebenarannya harus melalui penelitian.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

- Diduga terdapat hubungan atau korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2014-2023.